



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Gubernur Sulawesi Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-767 Tahun 2012, tanggal 5 November 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;



Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



13. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012;



Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.952.008.829.760,80 bertambah sejumlah Rp.7.019.723.629,92 sehingga menjadi Rp.959.028.553.390,72 dengan rincian sebagai berikut :

1. **PENDAPATAN**

a. Semula

Rp. 952,008,829,760.80

b. Bertambah

Rp. 7,019,723,629.92

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 959,028,553,390.72

2. **BELANJA**

a. Semula

Rp. 969,008,829,760.80

b. Bertambah

Rp. 18,887,320,098.40

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 987,896,149,859.20

Defisit Setelah Perubahan Rp. -28,867,596,468.48



3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan

a. Semula	Rp.	19,000,000,000.00
b. Berkurang	Rp.	5,745,297,429.92

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 13,254,702,570.08

Pengeluaran

a. Semula	Rp.	2,000,000,000.00
b. Bertambah	Rp.	0.00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2,000,000,000.00

Pembiayaan Neto Rp. 11,254,702,570.08

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. -17,612,893,898.40

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	134,984,568,695.50
2. Bertambah	Rp.	6,063,283,629.92

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 141,047,852,325.42



b.	Dana Perimbangan		
1.	Semula	Rp.	663,009,281,065.30
2.	Bertambah	Rp.	0.00
			<hr/>
	Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	663,009,281,065.30
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp.	154,014,980,000.00
2.	Bertambah	Rp.	956,440,000.00
			<hr/>
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	154,971,420,000.00

(2). Pendapat Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Pajak Daerah Sejumlah		
1.	Semula	Rp.	94,930,185,805.50
2.	Bertambah	Rp.	6,063,283,629.92
			<hr/>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	100,993,469,435.42
b.	Retribusi Daerah Sejumlah		
1.	Semula	Rp.	6,855,000,000.00
2.	Bertambah	Rp.	0.00
			<hr/>
	Jumlah Retribusi Setelah Perubahan	Rp.	6,855,000,000.00



c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0.00
	2. Bertambah	Rp.	
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp.		0.00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	33,199,382,890.00
	2. Berkurang	Rp.	0.00
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan Rp.		33,199,382,890.00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan

a.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah		
	1. Semula	Rp.	35,542,640,065.30
	2. Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.		35,542,640,065.30
b.	Dana Alokasi Umum Sejumlah		
	1. Semula	Rp.	590,680,361,000.00
	2. Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.		590,680,361,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah		
	1. Semula	Rp.	36,786,280,000.00
	2. Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp.		36,786,280,000.00



(4). Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Sejumlah	
1. Semula	Rp.	435,000,000.00
2. Bertambah	Rp.	150,000,000.00
	Jumlah Hibah dari Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp.	585,000,000.00
b.	Dana Darurat Sejumlah	
1. Semula	Rp.	0.00
2. Bertambah	Rp.	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp.	0.00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Sejumlah	
1. Semula	Rp.	0.00
2. Bertambah	Rp.	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp.	0.00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah	
1. Semula	Rp.	153,579,980,000.00
2. Bertambah	Rp.	806,440,000.00
	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp.	154,386,420,000.00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah sejumlah	
1. Semula	Rp.	0.00
2. Bertambah	Rp.	
	Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.	0.00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :



a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
	1. Semula	Rp.	395,774,452,672.16
	2. Berkurang	Rp.	14,760,488,240.96
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	381,013,964,431.20
b.	Belanja Langsung sejumlah		
	1. Semula	Rp.	573,234,377,088.64
	2. Bertambah	Rp.	33,647,808,339.36
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	606,882,185,428.00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah		
	1. Semula	Rp.	155,974,247,416.16
	2. Berkurang	Rp.	5,754,331,187.96
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	150,219,916,228.20
b.	Belanja Bunga sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0.00
	2. Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0.00
c.	Belanja Subsidi sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0.00
	2. Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0.00
d.	Belanja Hibah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	169,823,255,256.00
	2. Berkurang	Rp.	7,038,032,756.00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	162,785,222,500.00



e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
	1. Semula	Rp.	12,826,950,000.00
	2. Berkurang	Rp.	5,701,694,997.00
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.	7,125,255,003.00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa sejumlah		
	1. Semula	Rp.	45,000,000,000.00
	2. Bertambah	Rp.	2,000,000,000.00
		Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.	47,000,000,000.00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah		
	1. Semula	Rp.	8,650,000,000.00
	2. Bertambah	Rp.	2,340,200,000.00
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.	10,990,200,000.00
h.	Belanja Tidak Terduga Sejumlah		
	1. Semula	Rp.	3,500,000,000.00
	2. Berkurang	Rp.	606,629,300.00
		Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp.	2,893,370,700.00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah		
	1. Semula	Rp.	78,700,167,308.64
	2. Bertambah	Rp.	3,252,719,541.86
		Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.	81,952,886,850.50



b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
	1. Semula	Rp.	346.006.085.550,00
	2. Bertambah	Rp.	22.493.332.084,49
			<hr/>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	368.499.417.634,49
c.	Belanja Modal sejumlah		
	1. Semula	Rp.	148.528.124.230,00
	2. Bertambah	Rp.	7.901.756.713,01
			<hr/>
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	156.429.880.943,01

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Sejumlah		
	1. Semula	Rp.	19,000,000,000.00
	2. Berkurang	Rp.	5,745,297,429.92
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	13,254,702,570.08
b.	Pengeluaran Sejumlah		
	1. Semula	Rp.	2,000,000,000.00
	2. Bertambah	Rp.	0.00
			<hr/>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	2,000,000,000.00



(2). Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

1. Semula	Rp.	19,000,000,000.00	
2. Berkurang	Rp.	5,745,297,429.92	
Jumlah SILPA Setelah Perubahan Rp.			13,254,702,570.08

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0.00	
2. Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.			0.00

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	0.00	
2. Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah Setelah Perubahan Rp.			0.00



d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1.	Semula	Rp.	0.00
2.	Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Setelah Perubahan Rp.		0.00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1.	Semula	Rp.	0.00
2.	Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan Rp.		0.00
f.	Penrimaan Piutang daerah sejumlah		
1.	Semula	Rp.	0.00
2.	Bertambah	Rp.	0.00
	Jumlah Piutang daerah Setelah Perubahan Rp.		0.00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1.	Semula	Rp.	-
2.	Bertambah	Rp.	-
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.		0.00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1.	Semula	Rp.	2,000,000,000
2.	Berkurang	Rp.	-
	Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp.		2,000,000,000.00



c.	Pembayaran pokok utang sejumlah		
1.	Semula	Rp.	-
2.	Bertambah	Rp.	-
Jumlah Pembayaran Pokok utang setelah Perubahan			Rp. 0.00

d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1.	Semula	Rp.	-
2.	Berkurang	Rp.	-
Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0.00

Pasal 5

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi ;
3. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

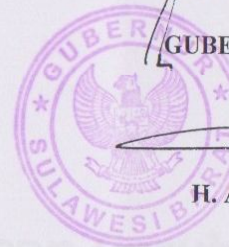
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sulawesi Barat.

ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 13 November 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 13 November 2012

SEKRETARIS PROVINSI SULAWESI BARAT

H. H. Hamid Zuhuddin, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 05

